

TAHUN 2023



LKJIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kata Pengantar

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 tepat pada waktunya.

LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPPP ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di DPPP tahun berikutnya. Karena didalamnya terdapat kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini untuk itu diharapkan saran dari semua pihak untuk penyempurnaannya. Atas perhatian serta peran serta pihak terkait dalam penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terima kasih.

Tarempa, Februari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,

Rovaniyadi, S.P

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 197107262002121005

Daftar Tabel

TABEL 1.1	Rekapitulasi PNS dan PTT Berdasarkan Jenis Kelamin	2
TABEL 1.2	Rekapitulasi PNS dan PTT Berdasarkan Golongan.....	3
TABEL 1.3	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir ..	4
TABEL 2.1	Tujuan dan Sasaran	11
TABEL 2.2	Indikator Kinerja Utama	12
TABEL 2.3	Perjanjian Kinerja.....	13
TABEL 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	15
TABEL 3.2	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022.....	16
TABEL 3.3	Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	17
TABEL 3.4	Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	18
TABEL 3.5	Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	20

Daftar Gambar

GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Pertanian 6

Daftar Lampiran

LAMPIRAN I Dokumen Kinerja seluruh Bidang di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2021



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan



Anambas sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 191 orang yang terdiri dari 54 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 137 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tersebar di Dinas Perikanan Pertanian Pangan sebanyak 73 orang dan di Unit Pelaksana Tugas Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (UPT DPPP) dan atau wilayah bidang perikanan/ pertanian kecamatan sebanyak 118 orang. Data jumlah pegawai ditampilkan di bawah ini:

Tabel 1.1. Jumlah ASN Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Bertugas Tahun 2022

No	Unit Kerja	PNS&PTT		PNS		PTT	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN	43	30	25	13	18	17
2	UPT PERBENIHAN IKAN	18	1	3	1	15	0
A	WILAYAH KERJA KECAMATAN SIANTAN TENGAH	3	2	1	0	2	2
B	WILAYAH KERJA KECAMATAN SIANTAN TIMUR	2	1	0	0	2	1
C	WILAYAH KERJA KECAMATAN SIANTAN SELATAN	2	0	0	0	2	0
D	WILAYAH KERJA KECAMATAN JEMAJA	8	5	1	0	7	5
E	WILAYAH KERJA KECAMATAN JEMAJA TIMUR	14	3	1	0	13	3
F	WILAYAH KERJA KECAMATAN PALMATAK	9	6	1	0	8	6
3	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	6	4	2	2	4	2
4	UPT BALAI BENIH PERTANIAN TERPADU	8	4	3	0	5	4
A	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN SIANTAN SELATAN	3	1	0	1	3	0
B	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PALMATAK	3	6	0	0	3	6
C	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN JEMAJA TIMUR	6	3	0	0	6	3
	Jumlah	125	66	37	17	88	49

Sumber : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan KKA Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa ASN terbanyak terdapat di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sebanyak 38 orang dan yang paling sedikit di Wilayah Bidang Perikanan Kecamatan Siantan Timur dan Wilayah Bidang Pertanian Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan palmatak, BPP Kecamatan Palmatak dan Jemaja Timur. Sedangkan untuk PTT yang terbanyak terdapat di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sebanyak 35 orang dan paling sedikit di Wilayah Bidang Pertanian Kecamatan Siantan Selatan sebanyak 2 orang. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah ASN dan PTT lelaki lebih banyak yakni 125 orang (65,44%) dari pada perempuan yang sebanyak 66 orang (34,55%). Akan tetapi, berdasarkan presentase tersebut, terdapat kenaikan jumlah ASN dan PTT wanita dibandingkan tahun sebelumnya.



Tabel 1.2. Jumlah ASN Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Berdasarkan Golongan dan Tingkat Eselon

NO	UNIT KERJA		GOLONGAN			Jumlah	TINGKAT ESELON					Non Eselon	Jumlah
			IV	III	II		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b		
1	DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN		1	36	1	38	1	1	5	1	0	30	38
2	UPT PERBENIHAN IKAN KEC. SIANTAN TENGAH		0	2	2	4	0	0	0	1	0	3	4
	2,1	UPT PERBENIHAN IKAN WILAYAH KERJA KEC. SIANTAN TENGAH	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
	2,2	UPT PERBENIHAN IKAN WILAYAH KERJA KEC. SIANTAN SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,3	UPT PERBENIHAN IKAN WILAYAH KERJA KEC. SIANTAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,4	UPT PERBENIHAN IKAN WILAYAH KERJA KEC. PALMATAK	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	2,5	UPT PERBENIHAN IKAN WILAYAH KERJA KEC. JEMAJA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
	2,6	UPT PERBENIHAN IKAN WILAYAH KERJA KEC. JEMAJA TIMUR	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
3	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN KEC. PALMATAK		0	3	1	4	0	0	0	1	1	2	4
4	UPT BALAI BENIH PERTANIAN TERPADU KEC. JEMAJA TIMUR		0	2	1	3	0	0	0	1	0	2	3
	2,1	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN SIANTAN SELATAN	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	2,2	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PALMATAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,3	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN JEMAJA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH						54							54

Sumber : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan KKA Tahun 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 54 orang ASN pada umumnya merupakan golongan III sebanyak 45 orang (83,33%), golongan II sebanyak 8 orang (14,8%) dan golongan IV sebanyak 1 orang (1,87%). Unit Kerja dengan jumlah ASN golongan III paling sedikit yaitu 0 adalah di UPT Wilayah Bidang Perikanan dan Pertanian di Kecamatan Siantan Tengah, Siantan Timur, Siantan Selatan, Palmatak, Jemaja dan Jemaja Timur.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 54 orang ASN, yang eselon II.b



sebanyak 1 orang, eselon III.a sebanyak 1 orang, eselon III.b sebanyak 5 orang, eselon IV.a sebanyak 4 orang, eselon IV.b sebanyak 1 orang dan non eselon sebanyak 42 orang.

Tabel 1.3. Jumlah ASN Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	PNS Pendidikan					JUMLAH
		S2	S1	D4	D3	SLTA	
1	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	0	34	0	1	3	38
2	UPT Perbenihan Ikan Kec. Siantan Tengah	0	2	0	0	2	4
2.1	Wilayah Kerja Perikanan Kec. Siantan Tengah	0	0	0	0	1	1
2.2	Wilayah Kerja Perikanan Kec. Siantan Timur	0	0	0	0	0	0
2.3	Wilayah Kerja Perikanan Kec. Siantan Selatan	0	0	0	0	0	0
2.4	Wilayah Kerja Perikanan Kec. Jemaja	0	0	0	0	1	1
2.5	Wilayah Kerja Perikanan Kec. Jemaja Timur	0	0	0	0	1	1
2.6	Wilayah Kerja Perikanan Kec. Palmatak	0	0	0	0	1	1
8	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kec. Palmatak	0	3	0	0	1	4
11	UPT Balai Benih Pertanian Terpadu Kec. Jemaja Timur	0	1	0	1	1	3
2.1	Wilayah Kerja Pertanian Kec. Siantan Selatan	0	1	0	0	0	1
2.2	Wilayah Kerja Pertanian Kec. Palmatak	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	41	0	2	11	54

Sumber : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan KKA Tahun 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 54 orang ASN pada umumnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 41 orang (75,92%), disusul pendidikan SLTA sebanyak 11 orang (20,37%), dan paling sedikit pendidikan DIII sebanyak 2 orang (0,3%). Belum ada ASN di DPPPP dengan tingkat pendidikan S2 dan D4.

C. Aspek strategis serta permasalahan utama

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e) Pengelolaan barang milik Daerah;
- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu sekretariat dan 5 (lima) bidang yakni sebagai berikut :

1. Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. Susunan organisasi sekretariat terdiri dari sekretaris dinas, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, jabatan fungsional keuangan dan jabatan fungsional program.
2. Bidang Perikanan Tangkap memiliki tugas yakni melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan nelayan. Susunan organisasi bidang pemberdayaan nelayan terdiri dari seksi peningkatan pemberdayaan manusia nelayan kecil, seksi kemitraan dan iptek nelayan kecil dan seksi pembinaan kelembagaan nelayan kecil.
3. Bidang Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan memiliki tugas yakni perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan dan kelayakan usaha.
4. Bidang Perikanan Budidaya memiliki tugas yakni perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembudidayaan ikan. Susunan organisasi bidang pembudidayaan ikan terdiri dari seksi pemberdayaan pembudidayaan ikan, seksi pakan, kesehatan ikan dan lingkungan dan seksi pembenihan dan pembesaran ikan.
5. Bidang Pertanian memiliki tugas yakni perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pertanian. Susunan organisasi bidang pertanian terdiri dari seksi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, seksi pengembangan peternakan dan seksi pengembangan perkebunan.
6. Bidang Ketahanan Pangan memiliki tugas yakni perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketahanan pangan. Susunan organisasi bidang ketahanan pangan terdiri dari seksi ketersediaan dan kerawanan pangan, seksi konsumsi dan keanekaragaman pangan dan seksi kelembagaan dan penyuluhan.

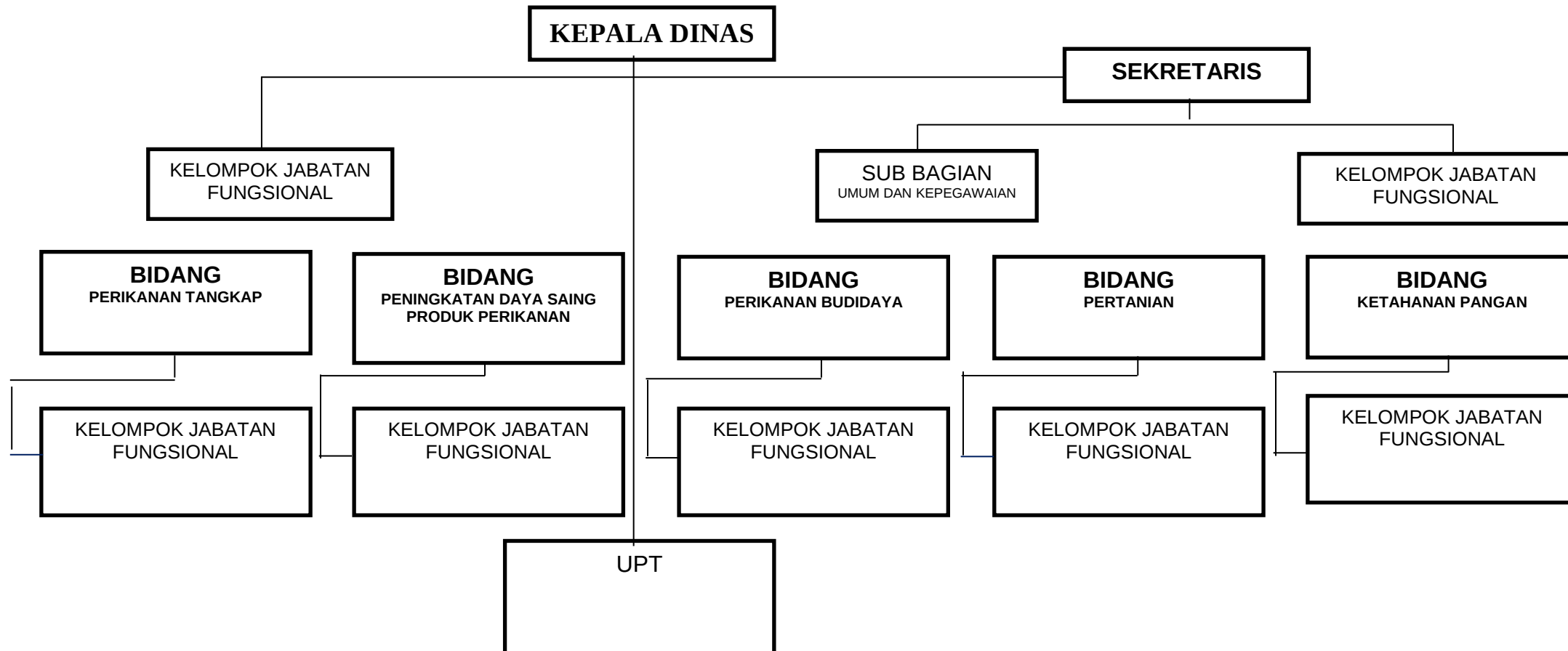
Susunan Organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari: Sekretariat; - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Perikanan Tangkap; Bidang Perikanan Budidaya; Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; Bidang Pertanian; Bidang Ketahanan Pangan; Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam struktur organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Adapun UPT Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud meliputi : UPT Pusat Kesehatan Hewan ; UPT Perbenihan Ikan; UPT Balai Benih Pertanian Terpadu; Balai Penyuluhan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dipimpin oleh kepala dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas





Berikut ini isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan:

1. Masih minimnya kelompok nelayan tangkap dan nelayan pembudidaya ikan yang terbina, juga masih kurangnya jumlah petani dan pekebun terlatih;
2. Masih lemahnya peran dan kinerja dari Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
4. Kurangnya penerapan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan;
5. Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan;
6. Kurangnya data yang akurat terkait dengan perikanan, pertanian dan pangan;
7. Kurangnya kajian yang dilakukan terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana perikanan, pertanian dan pangan;
8. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak bisa diakomodir karena UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga kewenangan dialihkan dari Kabupaten ke Provinsi dan Pusat.

D. Dasar Hukum

LKjIP Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026.



E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten yang Bermadiah (Berdaya saing Maju dan Berakhlakul karimah)

Visi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 mengacu pada visi Kepala Daerah yaitu:



**"Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan
yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah"**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan 3 Misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.

3. Tujuan dan Sasaran

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026:



Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani nelayan dan		Nilai Tukar Petani	100	101	101,5	102	102,5	102,7
			Nilai Tukar Nelayan	108	108,5	109	109,5	110	110,5
		Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Persentase cakupan bina kelompok petani	6%	15%	25%	35%	45%	50%
			Persentase cakupan bina kelompok nelayan	6%	10%	25%	30%	35%	40%
2	Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	27,43	27,97	28,23	28,77	29,01	29,02
			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	71,66	71,8	71,9	72	72,1	72,2
		Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	1%	2%	3%	4%	5%	6%
		Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (padi dan cengkeh)	1%	1,5 %	2%	2,5%	3%	4%
			Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)	1,5%	2%	2,5%	3%	4%	5%
		Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	10%	12%	15%	17%	20%	25%
		Meningkatnya ketahanan pangan	Score Pola Pangan Harapan	80	80,5	81	81,5	82	82,3



3	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah	CC/ 56,8	CC/ 57	CC/57,2	CC/57,4	CC/57,6	CC/57,7
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B/69	B/69,5	B/70	B/70,5	B/71	B/71,5
			Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	A/94,78	A/94,79	A/94,8	A/94,81	A/94,82	A/94,83



B. Indikator Kinerja Utama

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus
1	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Persentase cakupan bina kelompok petani	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n / jumlah kelompok tani x100%
		Persentase cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah kelompok perikanan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n / jumlah kelompok perikanan x100%
2	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Peningkatan produksi perikanan	(produksi perikanan tahun n – produksi perikanan tahun n-1)/produksi tahun n-1 *100
	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase Peningkatan produksi pertanian	(produksi pertanian (padi, cengkeh) tahun n – produksi pertanian tahun n-1)/produksi tahun n-1 *100
		Persentase Peningkatan produksi peternakan	(produksi peternakan tahun n – produksi peternakan tahun n-1)/produksi tahun n-1 *100
	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	(produksi pengolahan produk ikan tahun n – produksi pengolahan tahun n-1)/produksi tahun n-1 *100
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Score Pola Pangan Harapan	(tertera dalam laporan tahunan bidang pangan terkait score Pola Pangan Harapan)
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	(tertera pada LHE dari Inspektorat Kabupaten)
		Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	(sesuai dengan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik)



C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas dan sebagai bahan tahun 2022 diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Persentase cakupan bina kelompok petani	15 %
		Persentase cakupan bina kelompok nelayan	10 %
2.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	2 %
3.	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	1,5 %
		Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)	2 %
4.	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	12 %
5.	Meningkatnya ketahanan pangan	Score Pola Pangan Harapan	80,5
6.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,5 Poin
		Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	94,79 Poin

No.	Program	Anggaran
1.	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	650.806.000
2.	Pengawasan Keamanan Pangan	20.362.890
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	12.990.523.242
4.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.221.530.122
5.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	231.395.200
6.	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	112.123.000
7.	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	232.986.600
8.	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	131.477.768
9.	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	222.963.330
10.	Penyuluhan Pertanian	92.345.966

Penetapan kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten



Kepulauan Anambas Tahun 2022 diimplementasikan melalui 10 program dengan 26 kegiatan, 51 sub kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian



sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kategori	Sumber Data
A	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Nelayan	101,5 109	101 108,5	100%	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri
1	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Persentase cakupan bina kelompok petani	25%	27 Kel/ 32%	>100	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri
2		Persentase cakupan bina kelompok nelayan	25%	39 Kel/17%	>100	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri
B	Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	28,23 71,9	27,97 71,8*	100%	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri *Angka Sementara
3	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	3%	24.178,4 ton/14,96%	>100	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri
4	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	2%	623,93 ton/7,42%	>100	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri
5		Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)	2,5%	26.806 ekor/7,99%	>100	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri
6	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	15%	686,2 ton/ 92%	>100	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri
7	Meningkatnya ketahanan pangan	Score Pola Pangan Harapan	81	73,4	91,29	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri
C	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	CC/57,2	57*	100%	Sangat Tinggi	Tim RB Kabupaten
8	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B/70	77,35	>100	Sangat Tinggi	LHE Inspektorat



9	efisien	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	94,8	95,8	>100	Sangat Tinggi	Penilaian mandiri
---	---------	---	------	------	------	---------------	-------------------

Tabel III.2

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
A	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Nelayan	101 108,5	101 108,5	100%	101,5 109	101 108,5	100%
1	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Persentase cakupan bina kelompok petani	15	27 Kel/ 32%	>100	25%	27 Kel/ 32%	>100
2		Persentase cakupan bina kelompok nelayan	10	39 Kel/17%	>100	25%	39 Kel/17%	>100
B	Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	27,97 71,8	27,97 71,8*	100%	28,23 71,9	27,97 71,8*	100%
3	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	2	24.178,4 ton/ 14,96%	>100	3%	24.178,4 ton/ 14,96%	>100
4	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	1.5	623,93 ton/7,42%	>100	2%	623,93 ton/7,42%	>100
5		Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)	2	26.806 ekor/7,99%	>100	2,5%	26.806 ekor/7,99%	>100
6	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	12	686,2 ton/ 92%	>100	15%	686,2 ton/ 92%	>100
7	Meningkatnya ketahanan	Score Pola Pangan Harapan	80,5	73,4	91,29	81	73,4	91,29



	pangan							
C	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	57	57	100%	CC/57,2	NA	100%
8	Meningkatnya Tata Kelola	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69	64,36	96%	B/70	77,41	>100
9	Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	94,78	94,78	100%	94,8	95,8	>100

Tabel III.3
Tabel Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Capaian 2023	Capaian Renstra		Tingkat Kemajuan
					Target Akhir (2026)	Capaian Renstra s/d 2023	
A	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Nelayan	101 108,5	100%	102,7 110,5	87,7% 98%	87,7% 98%
1	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Persentase cakupan bina kelompok petani	27 Kel/ 32%	>100	50%	64%	64%
2		Persentase cakupan bina kelompok nelayan	39 Kel/ 17%	>100	40%	44%	44%
B	Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	27,97 71,8*	100%	29,02 72,2	96,4% 99%	96,4% 99%
3	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	24.178,4 ton/ 14,96%	>100	6%	20%	20%



4	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	623,93 ton/7,42%	>100	4%	20%	20%
5		Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)	26.806 ekor/7,99%	>100	5%	20%	20%
6	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	686,2 ton/92%	>100	25%	20%	20%
7	Meningkatnya ketahanan pangan	Score Pola Pangan Harapan	73,4	91,29	82,3	89,3%	89,3%
C	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	57	100%	57,7	98,89%	98,89%
8	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,35	>100	B/71,5	100%	100%
9		Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	95,14	>100	A/94,83	100%	100%

Tabel III.4
Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2023	Capaian 2023	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
A	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Nelayan	101,5 109	101 108,5	100%		
1	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok	Persentase cakupan bina kelompok petani	25%	49 Kel/ ...%	>100	Penyuluhan kepada kelembagaan petani	Peningkatan pembinaan terhadap kelompok tani,



	pertanian dan kelompok perikanan					dilaksanakan secara berkala, sehingga dapat diketahui kendala yang dihadapi petani.	pemberian bantuan yang dapat melatih petani untuk jadi lebih mandiri
2		Persentase cakupan bina kelompok nelayan	25%	39 Kel/...%	>100	Pembinaan terhadap kelompok perikanan tangkap dan budidaya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi kelompok tersebut pasca pemberian bantuan	Peningkatan pembinaan terhadap kelompok nelayan dan pembudidaya, pemberian bantuan yang dapat melatih pelaku usaha untuk jadi lebih mandiri
B	Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	28,23 71,9	27,97 71,8*	100%		
3	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	3	27.000 ton/...%	>100	Peningkatan produksi perikanan mengalami peningkatan sesuai dengan program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan produksi harus diimbangi dengan pendataan yang akurat, agar potensi perikanan dapat berkelanjutan
4	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	2	495,88 ton/...%	>100	Peningkatan produksi pertanian mengalami peningkatan sesuai dengan program peningkatan sarpras pertanian yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan	Pemberdayaan terhadap petani khususnya kelompok petani milenial dapat ditingkatkan, serta dengan pendataan sarpras pertanian
5		Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)	2,5	... ekor/...%	>100	Peningkatan produksi peternakan mengalami peningkatan sesuai dengan	Pelatihan terhadap tenaga penyuluh peternakan dapat



						program pemeliharaan dan penjaminan kesehatan hewan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan	dilaksanakan karena masih kurangnya tenaga medik veteriner
6	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	15	... ton/ %	>100	Peningkatan produksi olahan perikanan cukup signifikan karena pendataan para pelaku usaha olahan perikanan terdata dengan baik	Upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan pengolahan perikanan secara berkelompok
7	Meningkatnya ketahanan pangan	Score Pola Pangan Harapan	81	78,7	91,29	Masih terdapat konsumsi kelompok pangan yang belum mencapai skor ideal.	Diperlukan peningkatan kapasitas tenaga analisis ketahanan pangan
C	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	57,2	N/A	100%		
8	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	77,41	>100	Terdapat peningkatan nilai SAKIP yang signifikan karena pemenuhan dokumen SAKIP dan IKM	Diperlukan peningkatan kapasitas seluruh ASN di DPPP terkait dengan SAKIP dan IKM
9		Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	94.8	95,8	>100		



Tabel III.5
Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Target	Realisasi 2023	Capaian 2023	Anggaran	Realisasi	%Capaian	Tingkat Efisiensi
A	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan	101,5 109	101,5 109	100%	4.665.055.689	3.870.784.449	83%	0,83
1	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	25%	49 Kel/ ...%	>100	1.684.792.252	1.377.406.531	82%	0,82
2		25%	39 Kel/...%	>100	2.980.263.437	2.493.377.918	84%	0,84
B	Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	28,23	28,23	100%	12.057.667.569			
		71,9	71,9*		2.778.454.078			
3	Meningkatnya produksi perikanan	3%	27182 ton/ 29 %	>100	11.737.703.969	8.562.700.810	73%	0,73
4	Meningkatnya produksi pertanian	2%	495,88 ton/19,9%	<100	2.220.182.096	1.516.772.052	68%	0,68
5		2,5%	... ekor/...%	<100	558.271.982	209.133.018	37%	0,37
6	Meningkatnya produksi olahan perikanan	15%		>100	305.199.800	100.392.092	33%	0,33
7	Meningkatnya ketahanan pangan	81	78,7	90,62	319.963.600	144.969.245	45%	0,50
C	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	CC/57,2	NA	100%	14.502.894.242	12.225.940.661	84%	0,84
8	Meningkatnya Tata Kelola	B/70	BB/77,41	>100				
9	Pemerintah yang efektif dan efisien	A/94,8	A/95,8	>100				



Tabel III.6
Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak
A	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani	101,5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok tani	64 Kelompok	Menunjang
		Nilai Tukar Nelayan	109	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	29,4%	Menunjang
1	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Persentase cakupan bina kelompok petani	76,56%	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	24 Kali	Menunjang
		Persentase cakupan bina kelompok nelayan		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN yang dibina	23 Kelompok	Menunjang
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	225,2 Ton	Menunjang
B	Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	28,23	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan konsumsi pangan	62%	Menunjang
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	5%	Menunjang
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	25%	Menunjang
		Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	71,9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan sarana pertanian	47%	Menunjang
				Program Penyediaan Dan	Persentase Penyediaan	52%	Menunjang



				Pengembangan Prasarana Pertanian	prasarana pertanian		
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan hewan ternak dan kesmavet	78%	Menunjang
1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	25%	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi	16 Kelompok	Menunjang
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	495,88 ton	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3 pengelolaan	Menunjang
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan	1 kawasan	Menunjang
		Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)		Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit dan hijauan pakan ternak	-	Tidak Menunjang
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Jumlah penjaminan kesehatan hewan	1000 Ekor	Menunjang



				Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	1 Pelayanan	Menunjang
3	Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan	50%	Menunjang
4	Meningkatnya ketahanan pangan	Score Pola Pangan Harapan	78,7	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	target konsumsi pangan Per kapita	100%	Menunjang
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan	1 wilayah	Menunjang
C	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,41 / BB	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	Menunjang
		Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	95,8 / A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang



				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya BMD	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	100%	Menunjang



Penjelasan:

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2021-2026 sebanyak 9 indikator sasaran, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat tinggi, capaian melebihi target yaitu 91-100 persen sebanyak 9 indikator
- Tinggi, capaian di antara 76 persen-90 persen sebanyak 0 indikator
- Sedang, capaian di atas 66 persen-75 persen sebanyak 0 indikator
- rendah (capaian 51 persen-65 persen) sebanyak 0 indikator

Dari 9 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100 persen telah memenuhi kriteria SANGAT TINGGI, Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU dan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya adalah sebagai berikut:

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

- **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini dengan total sebesar Rp. 8.019.643.106 dan realisasi mencapai Rp. 7.231.692.294 atau sebesar 90,17%. Dari realisasi keuangan tersebut digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara selama 14 bulan (termasuk gaji ke-13 dan 14) dan tunjangan daerah selama 12 bulan. Selain itu, pada kegiatan ini juga terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD realisasi keuangan 77,03% dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi keuangan 0%. realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100% yaitu telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dan tidak ada kendala yang berarti.

2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 633.761.500 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 576.090.362 atau sebesar 90,9% dan realisasi fisik mencapai 94,04%. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dana pelaksanaannya campuran yaitu bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) dan APBD. Kegiatan ini mengakomodir 9 kelompok tani sebagai penerima manfaat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus



Non Fisik (DAK NF) dan 2 Kelompok Tani Penerima Manfaat yang bersumber dari Dana APBD , total 11 Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai penerima manfaat tersebut tersebar di Kecamatan Siantan sebanyak 3 KWT, Kecamatan Siantan Selatan sebanyak 1 KWT, Kecamatan Siantan Utara sebanyak 2 KWT Kecamatan Siantan Timur sebanyak 2 KWT (sumber dana APBD), Kecamatan Jemaja Sebanyak 1 KWT, Kecamatan Siantan Tengah sebanyak 1 KWT dan Kecamatan Palmatak sebanyak 1 KWT.

Kelompok penerima manfaat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus /DAK NF terdiri dari 4 Kelompok penumbuhan dan 5 Kelompok Pengembangan dengan nilai total anggaran Rp 450.000.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 442.436.562 atau sebesar 98.90% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari ini juga dilakukan untuk meningkatkan konsumsi pangan sejalan dengan upaya untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan (Score Pola Pangan Harapan). Komoditas sayur dan buah Kelompok sayur dan buah sangat penting peranannya dalam pencapaian kualitas sumber daya manusia. Masih rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena factor kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat masih kurang. Disisi lain, biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah sesuai njuran ternyata tidaklah murah. Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Untuk itu, dibutuhkan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Badan Ketahanan Pangan sudah melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dan Urban Farming untuk meningkatkan aksesibilitas dan konsumsi sayur dan buah. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan buah yang melibatkan dukungan dari berbagai lintas sektor.

Pada Kegiatan ini dilakukan juga Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Kegiatan



Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun ini mengusung tema “Makan Enak, Makan Sehat Makan B2SA”. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dalam 2 hari (16-17 November 2022) meliputi pemaparan materi klasikal dan praktik di lapangan. Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada hari pertama dilaksanakan di Sekolah SDTQ Insan Utama yang dihadiri oleh 60 orang peserta yang terdiri dari peserta, Panitia dan para majelis guru. Sedangkan untuk hari kedua, pelatihan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Siantan, terdiri dari para tamu dan Panitia dan Majelis Guru yang berjumlah 60 orang.

3. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 20.362.890 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 18.790.000 atau sebesar 92.23% dan realisasi fisik mencapai 98.88%.

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan melakukan penyediaan pada sarana dan prasarana uji mutu dan keamanan pangan berupa uji teskit pestisida dengan spesifikasi *G Fast pesticide Detection Kit Type S* Teskit ini digunakan untuk menguji residu pestisida dalam sampel dengan hasil pengujian hingga menunjukkan level aman atau tidak aman. Penyediaan sarana dan prasarana juga disediakan berupa teskit pemutih beras yang digunakan untuk menguji zat pemutih beras klorin pada sampel pangan dan air. penyediaan sarana dan prasarana ini dilakukan untuk memudahkan petugas pengawas pada *post market* agar dapat secara optimal dalam melakukan pengawasan keamanan pangan terutama pada pangans segar asal tumbuhan.



selain melengkapi penyediaan sarana dan prasarana uji mutu kegiatan ini juga dilakukan dengan melakukan pengujian beberapa sampel pangan segar yang ada di kabupaten kepulauan anambas salah satu lokasi pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian yaitu sampel dari Pasar impress Tarempa, sampel dari Perkebunan Kelompok Wanita Tani Cahaya Indah di Desa Batu Belah, Sampel dari penjual sayuran dan pangan segar di Kecamatan Kute Siantan dan Sampel dari Kebun Kelompok Wanita Tani di Desa Bayat. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil uji Residu Dengan Menggunakan tes kit *G Fast pesticide Detection Kit Type S* dan tes pemutih beras

No	Jenis Komoditi	Lokasi Pengambilan Sampel	Hasil Uji
1	Tomat	Pasar Inpres Tarempa	Tidak terdeteksi
2	Selada	Pasar Inpres Tarempa	Tidak terdeteksi
3	gambas	Pasar Inpres Tarempa	Tidak terdeteksi
4	mentimun	Pasar Inpres Tarempa	Tidak terdeteksi
4	Beras premium	Pasar inpres tarempa	Tidak terdeteksi
5	Sawi	KWT Mawar Desa Bayat kec Siantan Utara	Tidak terdeteksi
6	mentimun	KWT Mawar Desa Bayat kec Siantan Utara	Tidak terdeteksi
7	Cabe Merah	Toko sayur milik individu Kecamatan Kute Siantan	Tidak terdeteksi
8	Bawang merah	Toko sayur milik individu Kecamatan Kute Siantan	Tidak terdeteksi
9	Buncis	Toko sayur milik individu Kecamatan Kute Siantan	Tidak terdeteksi
10	Bawang putih	Toko sayur milik individu Kecamatan Kute Siantan	Tidak terdeteksi
11	Cabe Hijau	Toko sayur milik individu Kecamatan Kute Siantan	Tidak terdeteksi
12	Gambas	KWT Cahaya Indah Desa Batu Belah kec Siantan Timur	Tidak Terdeteksi
13	Buncis	KWT Cahaya Indah Desa Batu Belah kec Siantan Timur	Tidak Terdeteksi

4. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 92.345.966 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.78.914.700 atau sebesar 85.46% dan realisasi fisik mencapai 100% (memenuhi target kinerja yang direncanakan). Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa



Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 4.265.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 4.265.000 atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung operasional Balai Penyuluhan Pertanian dengan memberikan bahan kegiatan kantor seperti HVS , dan dilakukannya monitoring dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan.

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.084.900 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.084.900 atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan penyuluhan dengan mempraktekkan cara budidaya tanaman cabai kepada Kelompok Wanita Tani dan membagikan kepada petani benih tanaman hortikultura sebagai strategi awal untuk menumbuhkan minat dan pengetahuan petani dalam budidaya tanaman hortikultura dalam skala rumah tangga. Dalam sub kegiatan ini juga terdapat uraian kegiatan untuk menunjang operasional Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Lapangan (PPL)

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 79.996.066 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 66.564.800 atau sebesar 83,21% dan realisasi fisik sebesar 97,31%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan, dimana terdapat uraian belanja untuk mendukung kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam melakukan program peningkatan pengetahuan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dalam sub kegiatan ini selain benih dan pupuk sebagai salah satu bahan dalam melaksanakan penyuluhan terdapat uraian belanja pakaian dinas lapangan untuk penyuluh pertanian sebagai salah satu momentum untuk meingkatkan kinerja.

5. Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 131.477.768 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 123.393.300 atau sebesar 93,85% dan realisasi fisik mencapai 98,72%. Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya petani dengan diberikannya bantuan alat prasarana produksi pertanian berupa Handsprayer. Kegiatan ini juga memberikan output dokumen DED pembangunan Bangunan Rice milling Unit (RMU), dokumen DED



pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Jemaja Timur, dan kegiatan tunda bayar 2021 berupa dokumen DED pembangunan pagar benih pertanian terpadu di Kecamatan Jemaja Timur dan dokumen DED pembuatan kandang penggemukan sapi di Kecamatan Siantan.

6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 95.396.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.244.705 atau sebesar 49.52% dan realisasi fisik 96.47%. Capaian output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis, dokumen penganggaran dan LKJIP (memenuhi target kinerja atau output yang direncanakan).

7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 43.800.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.500.000 . Capaian output kegiatan ini adalah pembayaran honor kepada pejabat dan staf penatausahaan barang dengan persentase realisasi fisik 100% dan telah memenuhi target yang direncanakan.

8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 130.847.501 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 124.611.500. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tidak dilaksanakan sehingga pada perubahan APBD pagu DPA dialihkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas.

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 610.568.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 381.468.035 atau sebesar 62.48% dan realisasi fisik 94.22%. pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan



dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. dengan persentase realisasi fisik 98.81% dan telah memenuhi target yang direncanakan.

10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 266.797.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 264.797.000 atau sebesar 99.28% dan realisasi fisik 99.29%. Output yang dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya sewa gedung kantor dan gudang penyimpanan dengan persentase realisasi fisik 100% dan telah memenuhi target yang direncanakan.

11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.3.792.272.835 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.674.702.215 atau sebesar 96.9% dan realisasi fisik sebesar 100% (telah memenuhi target yang direncanakan). Output kegiatan ini adalah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu pembayaran gaji PTT selama 12 bulan.

12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 31.290.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.225.000 atau 67.83% dan realisasi fisik pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 94.49% (telah memenuhi target yang direncanakan). Akan tetapi, terdapat kendala pada pembayaran pajak kendaraan, dimana biaya pada kuitansi pajak kendaraan yang tidak sesuai dengan harga yang tercantum di DPA.



13. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 912.065.402 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 902.983.500 Capaian Kinerja realisasi fisik 78.78% Beberapa Kegiatan Pengadaan Bantuan untuk masyarakat telah dilaksanakan Dan Telah Di Serahkan Kepada Masyarakat, Sementara Sebagian Lagi Tidak Dilaksanakan Dikarenakan ketidaksediaan anggaran. Maka realisasi keuangan hanya mencapai 99% yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

14. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 309.464.720 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 299.055.594 atau 96.64% (tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan) dan realisasi fisik 100%. Penyelenggaraan TPI terkendala dengan kurangnya prasarana cold storage (*refocussing* KKP). Untuk selanjutnya akan dilakukan pendataan kapal atau pompong yang mendaratkan ikan dipasar ikan. Terdapat rincian belanja yang tidak terlaksana disebabkan oleh ketidaksediaan anggaran.

15. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 50.745.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.445.000 atau 85.61% dan realisasi fisik 99.21%.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil.

Kegiatan ini dengan sasaran adalah kelompok pembudidaya (POKDAKAN) yang dibentuk dan dikembangkan. Untuk realisasi Belanja Barang Pakai Habis (Alat Tulis Kantor, Bahan untuk kegiatan kantor, Foto copy, materai, dan belanja tinta printer) pada kegiatan ini sudah mencapai 100 % baik realisasi fisik maupun keuangan.

Pada sub-kegiatan ini terdapat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (berupa papan plang nama kelompok sebanyak 11 unit) yang diserahkan kepada kelompok pembudidaya ikan di Kecamatan Siantan Tengah, Siantan Timur dan Pakmatak dengan anggaran sebesar Rp. 10.933.500.

Belanja Jasa Kantor yang terdiri Belanja jasa Tenaga Administrasi yang sudah terealisasi 91,67% dan Belanja Perjalanan Dinas (Perjalanan Dinas Biasa yang sudah terealisasi fisik 100% dan 100% keuangan dan



Perjalanan Dinas dalam Kota terealisasi 76,13% fisik dan 70,59% keuangan).

Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil.
Kegiatan ini pada tahun anggaran 2022 sampai dengan bulan Desember tidak dilaksanakan karena item belanja pada kegiatan tersebut hanya berupa belanja barang pakai habis dan tidak adanya belanja prasarana pembudidaya ikan.

16. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 0 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 dan realisasi fisik 0%. **Sub Kegiatan** : Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota. Sub-Kegiatan ini belum dilaksanakan sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2022 dan sub-kegiatan ini tidak direalisasikan pada tahun anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena aturan yang masih simpang siur dan SOP pengurusan TDPIK yang belum jelas apakah kewenangan Provinsi atau Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

17. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 180.650.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 174.550.200 96.62% dan realisasi fisik 100%. **Sub Kegiatan** : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 21.748.200, dengan realisasi fisik 90,34% dan realisasi keuangan sebesar 90,34% dimana beberapa rekening belanja secara fisik dan keuangan realisasinya sudah 100 % yakni pada rekening belanja Barang Pakai Habis. Untuk Belanja Jasa kantor (Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) mencapai 100%. Khusus untuk perjalanan dinas dalam kota, secara fisik sudah terealisasi 90,15% dengan realisasi keuangan sebesar 90,15%.



• **Sub Kegiatan** : Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini pada tahun anggaran 2022 tidak dilaksanakan karena item belanja pada kegiatan tersebut hanya berupa belanja barang pakai habis dan tidak adanya belanja prasarana pembudidaya ikan.

• **Sub Kegiatan** : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.142.546.800 kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota mencapai realisasi fisik dan keuangan sebesar 96,8% (mencapai target yang direncanakan). Pada sub-kegiatan ini juga terdapat rekening belanja Sarana dan prasarana Budidaya (Jaring) untuk kelompok pembudidaya ikan Desa Piabung Kecamatan Palmatak yang merupakan Pelunasan Hutang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 121.000.000

• **Sub Kegiatan** : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan ini pelaksanaannya merupakan salah satu kegiatan rutin Bidang Perikanan Budidaya dalam rangka monitoring hama dan penyakit ikan pada usaha pembudidayaan ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan rekening belanja pada kegiatan ini mencapai 100% yakni belanja barang pakai habis (Alat tulis kantor, Bahan untuk kegiatan kantor, Foto copy dan belanja tinta printer) dan Belanja Perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam kota maupun perjalanan dinas biasa.

18. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dana pelaksanaannya campuran yaitu bersumber dari APBD. Kegiatan ini bertujuan untuk penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yaitu dokumen tanda daftar sehingga pelaku usaha pengolahan dan



pemasaran produk perikanan terdaftar secara resmi serta memiliki izin. Selain itu dinas memiliki

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 9.849.5000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.549.500 atau sebesar 86.80% dan realisasi fisik mencapai 90.44%.

Pada tahun 2002 jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang sudah melakukan pendaftaran mencapai 88 orang dengan berbagai jenis usaha seperti usaha kerupuk ikan, kerupuk atom, bakso, cumi/bilis kering dan sebagainya.

Kegiatan ini akan terus kami sosialisasikan kepada para pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan agar mendaftarkan usahanya secara resmi dan berizin. Adapun kendala kegiatan ini masih banyak pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki usaha secara resmi dan berizin agar memudahkan produk mereka diterima oleh pasar, selain itu untuk pendaftaran ini masih menggunakan sistem berbasis daring yang mana tidak disetiap daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki sinyal/jaringan yang mendukung untuk mengakses secara daring sehingga masyarakat kurang berminat untuk mendaftar.

19. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dana pelaksanaannya yaitu bersumber dari Dana APBD. Kegiatan ini dilakukan tersedianya data dan informasi dan meningkatnya pengetahuan Poklaksar dalam penerapan persyaratan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran bagi pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, sasaran yang dicapai yaitu terbentuknya sejumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Serapan Anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil ini dengan total Rp 21.323.500 dengan realisasi keuangan



mencapai Rp 15.173.500 atau 71.16 % dari pagu anggaran total dan realisasi fisik mencapai 96,25 %.

Adapun kendala di kegiatan ini masih banyaknya pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang belum berkelompok dan bimbingan terkait perizinan, sehingga penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang mewajibkan penerima bantuan yang diserahkan ke masyarakat harus berkelompok. Selain itu unit pengolahan ikan yang tersebar di Kabupaten kepulauan Anambas tidak merata di setiap desa sehingga banyak Desa yang tidak bisa membentuk kelompok karena jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan tidak mencapai 10 (sepuluh orang).

20. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 232.986.600 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 213.206.600 atau sebesar 91,51% dan realisasi fisik mencapai 92,12%. Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya petani dengan adanya bantuan sarana produksi pertanian berupa bahan bibit/benih tanaman dan Pupuk NPK sebagai bentuk dari penanggulangan inflansi tanaman Cabe.

21. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis adalah kegiatan yang dana pelaksanaannya bersumber dari APBD. Kegiatan ini dilakukan untuk mengendalikan dan menanggulangi permasalahan penyakit hewan/ternak di lingkungan peternak hingga yang bersifat zoonosis. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang dilakukan dapat berupa pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pengecekan kesehatan, pemberian vitamin, pengobatan, melakukan inseminasi buatan, pengecekan kebuntingan, hingga pengendalian anjing liar. Kegiatan ini dilaksanakan diseluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan melibatkan petugas-petugas lapangan yang ada di beberapa kecamatan dengan jumlah populasi hewan/ternak terbanyak,



seperti di Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Kute Siantan.

Jumlah pelayanan yang telah dilakukan pada kegiatan ini ialah sebanyak 4872 ekor pelayanan selama tahun 2022. Jumlah ini sudah sangat melebihi target yakni 900 ekor pelayanan. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan selama tahun 2022 dilaksanakan jauh melebihi target mengingat Indonesia sedang diterpa oleh virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak ruminansia seperti sapi, kambing dan domba. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mencegah sebaran virus PMK ke berbagai wilayah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sudah melakukan upaya-upaya pencegahan masuknya virus PMK ke wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya kasus PMK yang ditemukan pada ternak sapi maupun kambing yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Total pagu anggaran pada sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis ini ialah Rp. 83.814.430,- yang bersumber dari APBD. Capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan ini ialah Rp. 73.910.430,- atau sebesar 88,18%, sedangkan realisasi fisik kegiatan mencapai 97,94%. Capaian realisasi keuangan yang belum mencapai 100% dapat disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan, diantaranya seperti kesalahan penginputan rekening kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga perlu dilakukannya perbaikan dan perubahan pada periode APBD-P. Hal-hal lain yang menjadi kendala ialah hal-hal teknis di lapangan dan administrasi perkantoran. Minimnya sumber daya petugas lapangan dengan wilayah topografi Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri atas beberapa pulau-pulau, serta belum terjangkaunya akses komunikasi yang memadai di beberapa

kecamatan merupakan kendala yang tidak dapat dihindari, sehingga tugas-tugas lapangan berserta pelaporan hasilnya tidak dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan adanya perhatian lebih



terhadap petugas-petugas lapangan, yakni dapat berupa fasilitas pelaksanaan kegiatan dan peningkatan SDM petugas dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bermaksud agar terlaksananya proses Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan sasaran kegiatan yaitu pelaku usaha perikanan antara lain POKLAHSAR dan pengumpul ikan dengan hasil akhir berupa meningkatnya sarana dan prasarana dalam industri pengolahan ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Serapan Anggaran pada kegiatan ini dengan nilai total anggaran Rp 80.950.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 14.950.000 atau 18.47 % dari pagu anggaran total dan realisasi fisik mencapai 25.88 %.

Adapun kendala di kegiatan ini masih banyaknya pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang belum berkelompok sehingga penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang mewajibkan penerima bantuan yang diserahkan ke masyarakat harus berkelompok. Selain itu unit pengolahan Ikan yang tersebar di Kabupaten kepulauan Anambas tidak merata di setiap desa sehingga banyak Desa yang tidak bisa membentuk kelompok karena jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan tidak mencapai 10 (sepuluh orang).

Adapun masalah lainnya yaitu unit pengolahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar berada di atas laut sehingga untuk memberikan bantuan khususnya melalui dana alokasi khusus menjadi terkendala dikarenakan aturan teknis yang mengatur tidak boleh bangunan unit pengolahan ikan berada di atas laut. Hal tersebut menjadi kendala ketika akan dibelanjakannya paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan arsitektur bedah unit pengolahan ikan tidak terlaksana. Paket pekerjaan tersebut untuk mendukung dana alokasi khusus yang akan di anggarkan pada tahun 2023 dan akhirnya di batalkan karena pembangunan unit



pengolahan ikan tersebut tidak sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

23. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan yang dana pelaksanaannya bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik). Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner kepada masyarakat khususnya peternak. Jasa medik veteriner yang dimaksud ialah seperti pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan ternak oleh dokter hewan sebagai petugas medik veteriner maupun petugas lapangan lainnya dibawah penyeliaan dokter hewan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama kecamatan-kecamatan yang memiliki banyak populasi ternak dan terjangkau oleh petugas, mengingat kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri atas pulau-pulau.

Total Anggaran pada kegiatan ini ialah Rp. 139.148.900,- yang terdiri dari Rp. 99.972.900,- Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dan Rp. 39.176.000,- Dana APBD. Dana DAK Non Fisik pada kegiatan semula pada perencanaanya diperuntukkan untuk dua Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Puskesmas Palmatak dan Puskesmas Jemaja Timur dengan pagu anggaran yang diberikan untuk satu puskesmas ialah Rp. 50.000.000,-. Berdasarkan juknis DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022, target pelayanan yang ditetapkan untuk satu puskesmas ialah 1580 pelayanan, sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat target 3160 pelayanan untuk dua puskesmas.

Adapun serapan anggaran realisasi keuangan pada kegiatan ini ialah sebesar Rp. 67.811.300,- atau 48,73% sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 96,55%. Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner ini disebabkan karena pelayanan jasa medik veteriner yang dapat diberikan hanya untuk satu puskesmas, yakni Puskesmas Palmatak. Sedangkan untuk Puskesmas Jemaja Timur



tidak dapat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa medic veteriner karena Puskesmas Jemaja Timur belum beroperasi sebagaimana Puskesmas pada mestinya, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada serapan anggaran kegiatan. Kendala lainnya pada pelaksanaan kegiatan ini ialah kegiatan ini baru dapat dilaksanakan setelah APBD-Perubahan, hal ini dikarenakan terdapatnya kesalahan penginputan rekening kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelayanan jasa medic yang telah dilakukan ialah sebanyak 560 pelayanan dari 3160 target pelayanan. Jumlah ini hanya sekitar 0.18% dari total target yang telah ditetapkan. Sedikitnya realisasi pelayanan jasa medic veteriner ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan oleh satu Puskesmas, yakni Puskesmas Palmatak. Kendala lainnya ialah waktu yang dirasa tidak cukup karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yakni pelaksanaan kegiatan yang baru dapat dilaksanakan setelah APBD-Perubahan. Dengan kata lain capaian pelayanan jasa medic veteriner yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas Palmatak ialah sebesar 0.35% dari 1580 target yang telah ditetapkan.

Kegiatan pelayanan jasa medic veteriner ini dilaksanakan oleh petugas-petugas dari Puskesmas yang di dukung oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, sehingga diharapkan kedepannya koordinasi antara Puskesmas dan Dinas dapat lebih ditingkatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatannya.

24. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 10.064.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.064.000 dan realisasi fisik sebesar 100%. berdasarkan capaian kinerja keuangan yaitu 100% yang memenuhi target yang direncanakan karena ketidaksediaan anggaran. Kondisi Ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan merupakan indikator strategis yang saling terkait, yang bisa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Fluktuasi harga pangan berpengaruh kepada kesejahteraan kepada



produsen maupun konsumen. Ketika harga produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka yang akan mengalami tekanan besar adalah produsen. Oleh karena itu disatu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemantauan stok, pasokan dan harga pangan terutama Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2022. Pada tahun 2022 lokasi sasaran adalah di Pasar Tarempa, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan Timur hanya saja untuk Kecamatan Siantan Timur tidak bisa dilaksanakan karena terjadi pengurangan anggaran Komoditas yang dipantau dalam kegiatan pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Mencangkup 14 (empat belas) komoditas :

Beras Premium; Beras Medium; Kedelai Biji Kering; Bawang Merah; Bawang Putih Bonggol; Cabai Merah Keriting; Cabai Rawit Merah; Daging Sapi Murni; Daging Ayam Ras ; Telur Ayam Ras; Gula Pasir Konsumsi; Minyak Goreng Kemasan Sederhana; Minyak Goreng Curah; Tepung Terigu.

25. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.980.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.730.500 dan realisasi fisik sebesar 91.41%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dilakukannya pengelolaan keseimbangan Cadangan Pangan dengan melakukan koordinasi dan pemantauan cadangan pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di gudang Bulog Cabang Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Koordinasi dilakukan dengan melakukan monitoring gudang penyimpanan beras CPPD, mendata stok saat ini dan melihat langsung proses perawatan dan pengelolaan beras CPPD di gudang Bulog. Selain itu Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan juga melakukan koordinasi dan sosialisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di kecamatan Siantan Utara, Kute Siantan dan Siantan Timur. Adapun sosialisasi yang dilakukan yaitu memberikan informasi terkait adanya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) berupa beras bulog di Kabupaten Kepulauan Anambas, informasi ini dilakukan agar kecamatan tersebut bisa melakukan antisipasi dan mendapatkan informasi lebih cepat jika terjadi bencana di wilayah



tersebut. Sehingga penyaluran beras bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

26. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 0 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 dan realisasi fisik sebesar 0%. berdasarkan capaian kinerja keuangan yaitu 0% yang memenuhi target yang direncanakan karena ketidaksediaan anggaran.

• **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Berdasarkan Tabel III.1, III.2, III.3, III.4, dan III.5 di atas dan Terdapat 6 sasaran strategis pada indikator kinerja utama di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, berikut penjelasannya yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan

1.1 Persentase cakupan bina kelompok petani

Keberhasilan pencapaian pada sasaran dan indikator kinerja ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan program penyuluhan pertanian yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa , dan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian. Untuk mewujudkan indikator ini maka dilaksanakan dengan pagu Rp. 92.345.966 dan terealisasi Rp.78.914.700 . Realisasi jumlah Poktan yang mengalami peningkatan kapasitas dan kemampuan sebanyak 27 Poktan atau 100% dari target. tercapainya target disebabkan Kerja keras penyuluh pertanian dalam proses pembinaan dan pendampingan menjadi berjalan dengan lancar sehingga kedepannya perlu dilakukan peningkatan kapasitas terhadap para penyuluh pertanian. Dalam upaya meningkatkan kemampuan kelompok tani (POKTAN) dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian dengan melaksanakan



penilaian klasifikasi kemampuan Poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan.

1.2 Persentase cakupan bina kelompok nelayan

Keberhasilan pencapaian pada sasaran dan indikator kinerja ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang terdiri dari kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil. Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan indikator ini maka dilaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan total pagu Rp. 726.462.661 Total uang yang terealisasi Rp. 710.017.147 yang diarahkan untuk pembinaan kelompok perikanan tangkap (KUB) dan kelompok perikanan budidaya (Pokdakan).

Realisasi jumlah KUB yang mengalami peningkatan kapasitas dan kemampuan pasca pembinaan dan pendampingan sebanyak 25 KUB dan 14 POKDAKAN atau >100% dari target sebanyak 6%.

2. Sasaran Meningkatnya produksi perikanan

2.1 Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)

Keberhasilan pencapaian pada sasaran meningkatnya produksi perikanan indikator kinerja Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) sangat berkaitan dengan pelaksanaan program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah kabupaten/kota, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap. Kegiatan: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sub kegiatan: Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Dengan



total pagu Rp. 726.462.661 Total uang yang terealisasi Rp. 710.017.147, yang diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan baik produksi ikan segar dan ikan budidaya.

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 mencapai 184,1 ton mengalami penurunan sebesar 4,3 ton jika dibandingkan dari tahun 2021 yang mencapai 188,4 ton. Capaian IKU terhadap capaian renstra 2021-2026 yang ditargetkan sebanyak 250 ton mencapai 75% dan pada tahun selanjutnya perlu ditingkatkan lagi guna tercapainya target renstra yang telah ditetapkan. Produksi terbesar dari perikanan budidaya didominasi oleh ikan Kerapu Cantik nilai produksi perikanan budidaya keseluruhan mencapai Rp. 13.135.000.000; (Tiga Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Dari jumlah produksi perikanan budidaya sebanyak 184,1 ton diekspor ke Hongkong. Adapun perusahaan eksportir ikan hidup yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni PT. Trimina Dinasti Agung, PT. Jaya Laut Siantan.

Jumlah produksi perikanan tangkap merupakan jumlah hasil produksi perikanan tangkap yang dihasilkan oleh seluruh armada penangkapan ikan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 23.775 ton. Produksi perikanan tangkap tersebut mengalami peningkatan 15,2% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan produksi perikanan tangkap ini berbanding lurus dengan bertambahnya armada penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan pada tahun 2022. Berkenaan dengan pandemi covid-19, peningkatan produksi perikanan tangkap berkaitan juga dengan semangat seluruh pelaku usaha perikanan tangkap untuk bangkit dan meningkatkan perekonomian.

Jenis hasil tangkapan di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil tangkap di perairan laut. Sebagian besar jenis tangkapan adalah ikan tongkol, ikan kerisi, ikan kwee, kakap merah, cumi dan tenggiri. Untuk mencapai sasaran dan capaian IKU maka diperlukan indikator pembentuk yang berasal dari output kegiatan sehingga tercapainya Capaian IKU setiap program yang telah direncanakan. Adapun indikator pembentuk kinerja jumlah produksi perikanan tangkap sebagai berikut:

3. Meningkatnya produksi pertanian

3.1 Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan

Keberhasilan dalam mewujudkan indikator ini tidak lepas dari pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan atau Tanaman.



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan:

Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub kegiatan terdiri dari Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Dengan total pagu Rp. 364.464.368 Total uang yang terealisasi Rp. 336.599.900 , yang diarahkan untuk meningkatnya produksi pertanian padi dan cengkeh serta tanaman pangan, perkebunan lainnya.

Untuk produksi cengkeh pada tahun 2022 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan sebesar 398 ton jika dibandingkan pada tahun 2021 433 ton. Tahun 2022 luas tanam cengkeh mengalami penambahan dibanding dengan luas tanam cengkeh pada tahun 2021 yakni mencapai 2.842 Ha. Luas tanaman cengkeh paling besar terdapat di Kecamatan Palmatak yang mencapai 711 Ha dan kecamatan lain memiliki luas tanam yang tidak terlalu luas berkisar antara 200-400 Ha.

Produksi tanaman padi pada tahun 2022 mencapai 175,32 ton dan mengalami penurunan sebesar dari tahun 2021 yang 190 ton. Untuk luas lahan yang tersedia, lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman padi hanya berlokasi di Kecamatan Jemaja Timur dengan luas tanam yang menurun dari sebelumnya (2021) hanya 78,5 Ha menjadi 65,5 Ha, luas panen 62 Ha. Produksi dan produktivitas tanaman padi tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semangat para petani Kabupaten Kepulauan didukung dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui APBD. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan adalah menyediakan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan berupa bibit pala yang diserahkan kepada 27 kelompok tani, kec. Siantan 8 kelompok, siantan selatan 4 kelompok, siantan timur 2 kelompok, jemaja 5 kelompok, Palmatak 1 kelompok, Siantan Tengah 1, Jemaja Timur 6.

3.2 Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)

Keberhasilan pencapaian pada sasaran meningkatnya produksi pertanian indikator kinerja persentase peningkatan produksi peternakan sangat berkaitan dengan pelaksanaan program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terdiri dari kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Dengan total pagu Rp. 222.963.330 Total uang yang terealisasi Rp. 141.721.730 yang diarahkan untuk meningkatnya produksi peternakan, khususnya sapi dan unggas juga hewan lainnya.



Jumlah populasi sapi potong pada tahun 2022 mencapai 1.909 ekor. Terdapat penurunan populasi sebesar 54,35% jika dibandingkan populasi tahun 2021 4.185 ekor. Jumlah populasi unggas ayam buras tahun 2022 adalah 22.700 ekor mengalami penurunan yang tidak signifikan dibandingkan Tahun 2021 20.733 ekor.

Selain jumlah produksi sapi dan ayam, program dan kegiatan ini juga melaksanakan penjaminan kesehatan terhadap hewan lainnya yang dibantu oleh UPT.Puskesmas. Indikator pembentuk jumlah ternak yang mengalami pengobatan sebanyak 3.380 ekor (100%). Jenis pelayanan yang dapat diberikan antara lain pengobatan, pemberian vitamin dan vaksinasi. Meskipun pelayanan kesehatan hewan ini lebih cenderung ke ternak masyarakat seperti sapi, kambing dan ayam, akan tetapi hewan lain seperti anjing dan kucing juga bisa menjadi objek pelayanan kesehatan hewan karena pada dasarnya pelayanan kesehatan hewan ditujukan untuk semua jenis hewan.

4. Meningkatnya produksi olahan perikanan

4.1 Persentase peningkatan produksi olahan perikanan

Keberhasilan pencapaian pada sasaran meningkatnya produksi olahan perikanan indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan perikanan sangat berkaitan dengan pelaksanaan program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan: Penerbitan Tanda Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Dengan total pagu Rp. 112.123.000 Total uang yang terealisasi Rp. 38.673.000, yang diarahkan untuk memiliki database pelaku usaha pengolahan hasil perikanan berikut dengan produksi olahan perikananannya.

Dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021, produksi olahan perikanan meningkat sangat tinggi. Sebelumnya produksi olahan perikanan adalah 680 ton, artinya meningkat >100%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun akhir renstra yaitu 2026 maka sudah mencapai 20%, diharapkan untuk tahun selanjutnya peningkatan produksi dapat terus meningkat hingga mencapai 100%.

5. Meningkatnya ketahanan pangan

1.1 Score Pola Pangan Harapan

Keberhasilan pencapaian pada sasaran meningkatnya ketahanan pangan indikator kinerja score pola pangan harapan sangat berkaitan dengan pelaksanaan program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan



Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program: Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan: Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan: Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota. Total pagu Rp. 671.168.890 Total uang yang terealisasi Rp. 608.664.862 yang diarahkan dapat meningkatkan konsumsi pangan dan menurunkan kerawanan pangan.

6. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien

6.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien, indikator kinerja Nilai SAKIP sangat berkaitan dengan pelaksanaan program program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Yang terdiri dari 26 sub kegiatan dengan total pagu Rp. 12.990.523.242 total yang terealisasi Rp. 11.788.240.749.

Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka SAKIP DPPP mengalami peningkatan dari 64,36 menjadi 77,35 pada Tahun 2022. Hal ini disebabkan dengan pandemic covid-19 yang menyebabkan tata kinerja di kantor mengalami kendala untuk melakukan rapat evaluasi dan lain sebagainya. Solusi yang dapat dilakukan untuk terus meningkatkan akuntabilitas adalah dengan melaksanakan perencanaan, pengukuran, evaluasi, pelaporan dengan baik sampai dengan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi yang terukur.

6.2 Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Program yang mendukung untuk mewujudkan indikator tersebut adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. Kegiatan: perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi keuangan



perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Yang terdiri dari 26 sub kegiatan dengan total pagu Rp. 12.990.523.242 total yang terealisasi Rp. 11.788.240.749. yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik di lingkungan DPPP.

Bila dibandingkan dengan capaian IKM Tahun 2020, maka terdapat peningkatan dari yang sebelumnya 95,14 menjadi 95,44. DPPP diharapkan dapat mempertahankan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar nilai IKM dapat terus stabil dan masyarakat akan terbantu dalam mendapatkan setiap pelayanan di bidang perikanan, pertanian dan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

- **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);**
Realisasi skor pola pangan harapan bila dibandingkan dengan susunan pola pangan harapan nasional termasuk pada segitiga perunggu. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018, nilai standar skor pola pangan harapan nasional adalah 100. Nilai 77,35 menunjukkan bahwa konsumsi pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas belum beragam dan bergizi seimbang. Sehingga masih harus terus diupayakan strategi diversifikasi pangan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**
Pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini sangat tinggi karena seluruh indikator yang mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal adalah sebagai berikut:
 - a. Walaupun masih dalam keadaan pandemi Covid-19 adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing bidang penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2021;
 - b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;



- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil. Rapat triwulan ini dilaksanakan secara internal pada masing-masing bidang;
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari OPD koordinatif di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan di DPPP.
- b. Adanya keterlibatan dari LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya melalui kegiatan dialog atau rapat kerja untuk mendukung beberapa pengembangan perikanan, pertanian dan pangan.
- c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga Kementerian Pertanian.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas. Solusi yang dapat dilakukan atas kurangnya kualitas SDM ini adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan pegawai. Selain itu, penerimaan pegawai baru dapat dilakukan secara merata ke seluruh bidang, sub bagian dan UPT.
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur DPPP. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di OPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi direncanakan pada tahun 2023 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk



menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas.

- d. Indikator pada level *impact* dan *Outcome* pada Bidang Ketahanan Pangan umumnya bersifat fisik (dokumen), sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level *impact* dan *Outcome* kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif maka diharapkan pada tahun berikutnya dokumen yang dihasilkan dapat didiseminasikan kepada seluruh pihak yang terkait;
- e. Pandemi yang terjadi sejak awal Tahun 2020, masih mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya kinerja di kantor. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat di kantor saat bekerja atau dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam bekerja.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$

Berdasarkan table III.5 terlihat bahwa tingkat efisiensi masing2 indikator sasaran hamper mencapai 1. Persentase efisiensi ini secara teori cukup baik, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari lembaga kementerian, LSM sektor perikanan, dan lain-lain sebagai pemateri, dan pemberi masukan.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.906.514.118 (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu



Seratus Delapan Belas Rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.412.849.235 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,61%, Silpa sebesar Rp. 1.493.664.883 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2022

NO.	SUB KEGIATAN	PAGU DPA	REALISASI			SISA
			KEUANGAN		FISIK	
			Rp	%	%	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(10)	(13)
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	650.806.000	589.884.862	90,64	94,04	60.921.138
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10.064.000	10.064.000	100,00	100	0
1	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10.064.000	10.064.000	100,00	100	0
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	6.980.500	3.730.500	53,44	91,41	3.250.000
2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6.980.500	3.730.500	53,44	91,41	3.250.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan	633.761.500	576.090.362	90,90	94,04	57.671.138



Angka Kecukupan Gizi						
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	633.761.500	576.090.362	90,90	94,04	57.671.138
PRORGAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		20.362.890	18.780.000	92,23	98,88	1.582.890
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		20.362.890	18.780.000	92,23	98,88	1.582.890
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.362.890	18.780.000	92,23	98,88	1.582.890
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.990.523.242	11.788.240.749	90,74	96,47	1.202.282.493
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95.396.000	47.244.705	49,52	96,47	48.151.295
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.396.000	41.094.705	68,04	96,47	19.301.295
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	6.150.000	17,57	77,76	28.850.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.019.643.106	7.231.692.294	90,17	108,33	787.950.812
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.778.593.106	7.046.352.294	90,59	90,59	732.240.812
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian(Verifikasi) Keuangan SKPD	240.600.000	185.340.000	77,03	100,00	55.260.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	450.000	0	0,00	8,33	450.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		43.800.000	42.500.000	97,03	100,00	1.300.000
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0,00	0,00	0
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.800.000	42.500.000	97,03	100,00	1.300.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		130.847.501	124.611.500	95,23	95,46	6.236.001
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130.847.500	124.611.500	95,23	95,46	6.236.000
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	0	0,00	0,00	1
Administrasi Umum Perangkat Daerah		610.568.800	381.468.035	62,48	94,22	229.100.765
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	2.692.000	1.192.000	44,28	91,67	1.500.000
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.546.000	29.207.000	98,85	99,36	339.000
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.944.000	11.286.000	87,19	95,75	1.658.000
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.778.800	27.965.800	80,41	96,40	6.813.000
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	25.000.000	23.843.000	95,37	100,00	1.157.000
19	Penyediaan Bahan/Material	3.677.000	3.510.000	95,46	96,67	167.000
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.266.000	7.524.000	61,34	91,78	4.742.000
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.665.000	276.940.235	56,56	91,75	212.724.765



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		266.705.000	264.797.000	99,28	99,29	1.908.000
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266.705.000	264.797.000	99,28	99,29	1.908.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.792.272.835	3.674.702.215	96,90	100,00	117.570.620
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.617.401	137.663.239	97,90	99,52	2.954.162
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.869.938	33.403.461	76,14	90,16	10.466.477
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.607.785.496	3.503.635.515	97,11	100,00	104.149.981
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31.290.000	21.225.000	67,83	94,49	10.065.000
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.300.000	11.015.000	82,82	94,49	2.285.000
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.990.000	10.210.000	56,75	93,22	7.780.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		1.221.530.122	1.202.039.094	98,40	78,78	19.491.028
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		912.065.402	902.983.500	99,00	78,78	9.081.902
28	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	745.099.800	742.139.800	99,60	99,70	2.960.000
29	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	157.017.500	154.097.500	98,14	98,18	2.920.000
30	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	9.948.102	6.746.200	67,81	78,78	3.201.902
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		309.464.720	299.055.594	96,64	100,00	10.409.126
31	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12.736.200	9.825.300	77,14	79,45	2.910.900
32	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	296.728.520	289.230.294	97,47	100,00	7.498.226
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		231.395.200	217.995.200	94,21	99,21	13.400.000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		50.745.000	43.445.000	85,61	99,21	7.300.000
33	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	0	0	0,00	0,00	0
34	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50.745.000	43.445.000	85,61	99,21	7.300.000
Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0,00	0,00	0
35	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0,00	0
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		180.650.200	174.550.200	96,62	100,00	6.100.000



36	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.248.200	19.648.200	92,47	93,63	1.600.000
37	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	0	0	0,00	0,00	0
38	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	142.546.800	138.046.800	96,84	98,12	4.500.000
39	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.855.200	16.855.200	100,00	100,00	0
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		112.123.000	38.673.000	34,49	268,16	73.450.000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		9.849.500	8.549.500	86,80	90,44	1.300.000
40	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	9.849.500	8.549.500	86,80	90,44	1.300.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		21.323.500	15.173.500	71,16	96,25	6.150.000
41	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	21.323.500	15.173.500	71,16	96,25	6.150.000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		80.950.000	14.950.000	18,47	81,47	66.000.000
42	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.950.000	14.950.000	18,47	81,47	66.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		232.986.600	213.206.600	91,51	92,12	19.780.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		232.986.600	213.206.600	91,51	92,12	19.780.000
43	Peningkatan Kualitas SDG Hewan atau Tanaman.	232.986.600	213.206.600	91,51	92,12	19.780.000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0,00	0,00	0
44	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0,00	0
45	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	0	0,00	0,00	0
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		131.477.768	123.393.300	93,85	98,72	8.084.468
Pembangunan Prasarana Pertanian		131.477.768	123.393.300	93,85	98,72	8.084.468
46	Pembangunan, Rehabilitas dan	131.477.768	123.393.300	93,85	98,72	8.084.468



	Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					
PRORGAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		222.963.330	141.721.730	63,56	194,49	81.241.600
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		83.814.430	73.910.430	88,18	97,94	9.904.000
47	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	83.814.430	73.910.430	88,18	97,94	9.904.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		139.148.900	67.811.300	48,73	96,55	71.337.600
48	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	139.148.900	67.811.300	48,73	96,55	71.337.600
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		92.345.966	78.914.700	85,46	297,31	13.431.266
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		92.345.966	78.914.700	85,46	297,31	13.431.266
49	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	4.265.000	4.265.000	100,00	100,00	0
50	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	8.084.900	8.084.900	100,00	100,00	0
51	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	79.996.066	66.564.800	83,21	97,31	13.431.266
TOTAL		15.906.514.¹¹⁸	14.412.849.²³⁵			1.493.664.⁸⁸³

E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan secara optimal dengan mengarahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun *stakeholder* atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

2. Prestasi Tingkat Kabupaten

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	-	-	-



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). dan menggambarkan kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai >100 % atau interpretasi sangat tinggi

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai >100 % atau interpretasi sangat tinggi

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai >100 % atau interpretasi sangat tinggi

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai >100 % atau interpretasi sangat tinggi

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 90,62% atau interpretasi sangat tinggi

Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan nilai >100% atau interpretasi sangat tinggi

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, Februari 2024
KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,

Rovaniyadi, S.P
Pembina Utama Muda/ IV.c



NIP. 197107262002121005



LAMPIRAN